



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2016 – 2021
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. S. Parman No. 1 Palangka Raya
Telp. (0536) 3221090 Fax. (0536) 3221674



KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di berbagai bidang saat ini, maka diperlukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 2016 — 2021 sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 –2021 Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan adanya perkembangan berbagai kegiatan, maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 akan memuat beberapa sasaran serta indikator program kegiatan yang khusus akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dan akan menjadi landasan serta pedoman operasional bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dokumen Rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ini ditulis dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dengan pernyataan Visi dan Misi Dinas serta bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra ini disusun berdasarkan masukan-masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan Renstra ini berpegangan pada program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya.

Kepala Dinas

Ir. Muhammad Hatta, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590202 198903 1 009



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Gambaran Pelayanan	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya SKPD	10
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	18
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	37
4.1 Visi dan Misi SKPD	37
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	37
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	39
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	41
BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44
BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 mengenai ketentuan umum rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan Perhubungan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Rumusan permasalahan Perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor Perhubungan, serta mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra ini berfungsi sebagai, pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Renstra SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD, terdiri dari :
 - 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
 - 2) Orientasi mengenai Renstra SKPD;
 - 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra SKPD; dan
 - 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD, terdiri dari :
 - 1) Perumusan rancangan Renstra SKPD, terdiri dari :
 - a) Pengelolaan data dan informasi;
 - b) Analisis gambaran pelayanan SKPD Provinsi;
 - c) Review Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/ Kota;



- d) Penelaahan RTRW Provinsi;
 - e) Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Provinsi;
 - f) Perumusan isu-isu strategis;
 - g) Perumusan visi dan misi SKPD Provinsi;
 - h) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD Provinsi;
 - i) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD Provinsi;
 - j) Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD Provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi SKPD Provinsi;
 - k) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - l) Perumusan indikator kinerja SKPD Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi;
 - m) Pelaksanaan forum SKPD Provinsi.
- 2) Penyajian rancangan Renstra SKPD, terdiri dari :
- a) Pendahuluan;
 - b) Gambaran Pelayanan SKPD;
 - c) Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d) Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan;
 - e) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f) Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Rancangan Renstra SKPD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD, sehingga diperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD.

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan



kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

d. Penetapan Renstra SKPD.

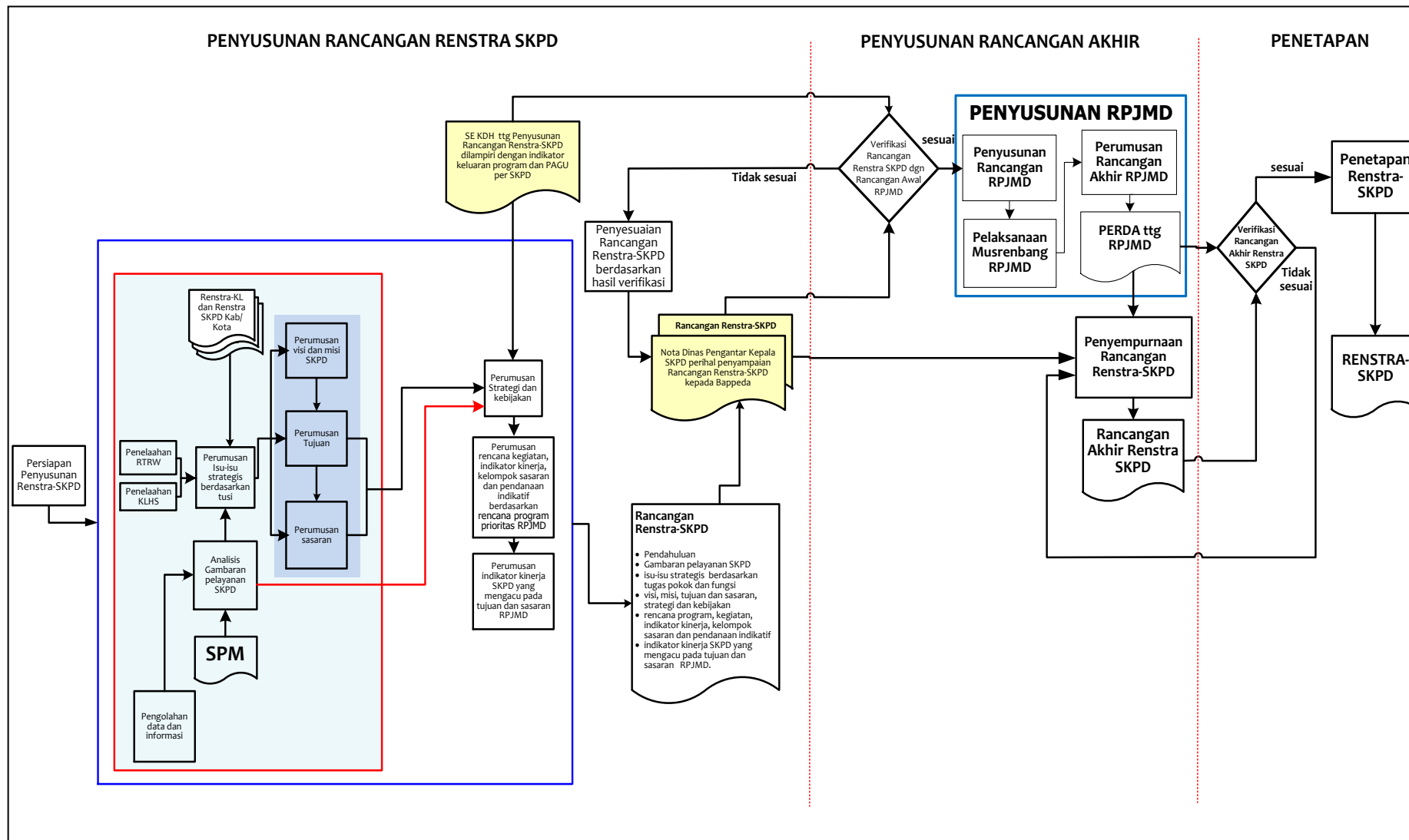
Rancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi akhir oleh Bappeda, guna menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD Lainnya.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra SKPD, antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait, Kebijakan pemerintah yang terkait, RPJMD provinsi, RTRW provinsi, Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi dan hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ini akan dijadikan pedoman setiap tahunnya guna menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dalam kaitannya akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar I.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD





1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- h. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2005.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ini dimaksudkan untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah untuk secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

Sedangkan tujuan Renstra Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas guna turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.



1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 2017-2021 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD



ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikatornya.

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini dikemukakan Kesimpulan dan beberapa rekomendasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

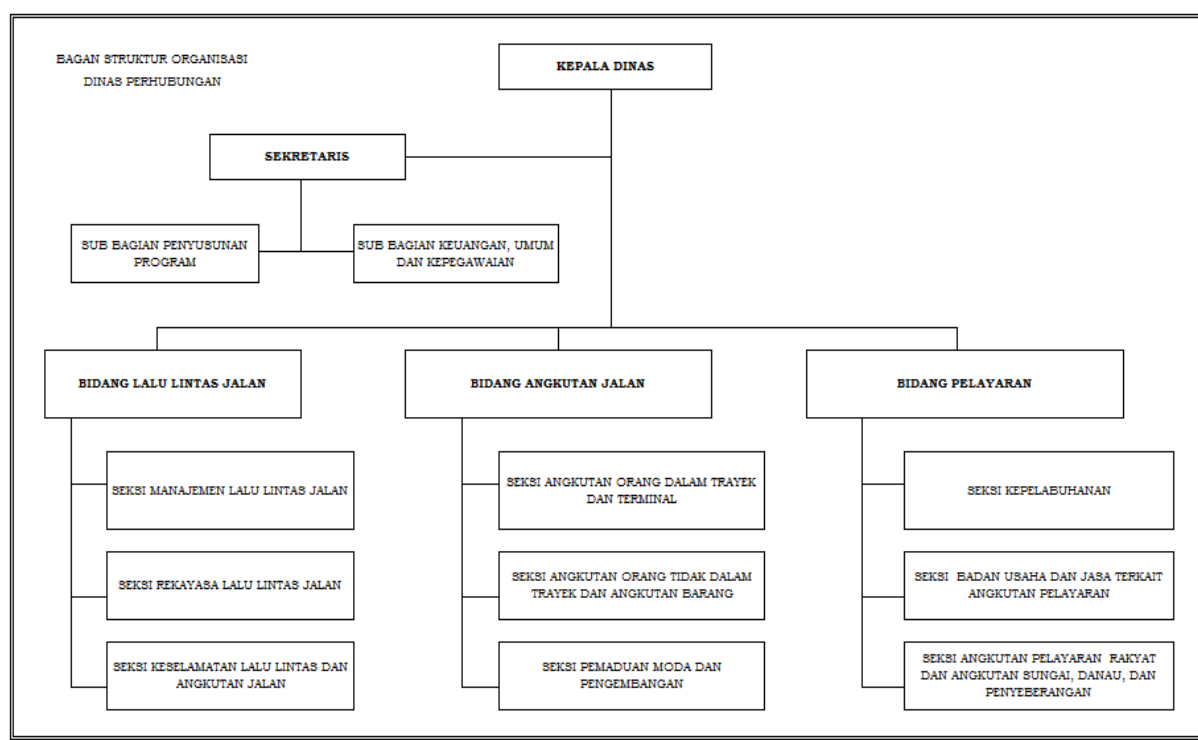
Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri atas :
 - 1) Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri atas :
 - a) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 - c) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- 2) Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
 - a) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 - b) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
dan
 - c) Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.
- 3) Bidang Pelayaran, terdiri dari :
 - a) Seksi Kepelabuhanan;
 - b) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
 - c) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan.

GAMBAR 1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Tengah



2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset.



2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan :

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV	7
2	III	37
3	II	21
Jumlah		65

b. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana	6
2	Sarjana	13
3	Diploma	14
4	SLTA	30
5	SLTP	1
6	SD	1
Jumlah		65

c. Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf :

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	11
4	Staf	49
Jumlah		65

d. Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Perpanjangan :

No.	Pelatihan Perpanjangan	Jumlah Pegawai
1	Diklatpim II	1
2	Diklatpim III	7
3	Diklatpim IV	9
Jumlah		17



2.2.2 Sumber Daya Lainnya

Sumber daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa asset bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

a. Sarana :

Jumlah Kendaraan sebagai berikut :

- 1) Roda 4 (empat) : 3 unit
- 2) Truk : 1 unit
- 3) Kendaraan Roda 3 : 2 unit

b. Prasarana :

- 1) Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah di Jl. S. Parman No.1 Palangka Raya.
- 2) Terminal Natai Suka Kabupaten Kotawaringin Barat, Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan, antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi.
- 3) Terminal Sanggu Buntok Kabupaten Barito Selatan, Pelaksanaan dan pengawasan moda transportasi angkutan umum perkotaan dan antar provinsi.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Review capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel II.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Jenis pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan																				
A. Angkutan Jalan																				
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	75	75	-	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Provinsi.	60	60	-	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%
2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Provinsi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Provinsi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40	40	-	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%
3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.	60	60	-	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%
4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Provinsi yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60	60	-	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%



No	Jenis pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
5	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Provinsi yang telah memiliki terminal.	50	50	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Provinsi yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Provinsi.	40	40	-	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
6	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Provinsi.	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
B. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU																				
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75	75	-	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
		Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Provinsi yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40	40	-	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	10%



No	Jenis pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
2	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Provinsi pada wilayah yang telah dilayani angkutan sungai dan danau.	60	60	-	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%
3	Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Provinsi.	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50	50	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
C. ANGKUTAN PENYEBERANGAN																				
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Provinsi pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Provinsi.	60	60	-	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Provinsi untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Provinsi	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%



No	Jenis pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
2	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Provinsi yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60	60	-	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%
3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Provinsi	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Provinsi	50	50	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
D ANGKUTAN LAUT																				
1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	90	90	-	10%	10%	20%	20%	30%	10%	10%	20%	20%	30%	10%	10%	20%	20%	30%
		Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Provinsi untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%



Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Jenis pelayanan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM (%)	Target IKK (%)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
2	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Provinsi untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60	60	-	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	15%	15%
3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Provinsi.	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100	100	-	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, maka hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi tersebut baik dari segi prasarana maupun dari segi keselamatan.

Berikut merupakan beberapa tantangan yang dapat dijabarkan, antara lain :

1. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan dibandingkan panjang jalan dan jumlah kebutuhannya.
2. Kurangnya rekayasa lalu lintas pada ruas jalan yang rawan kecelakaan.
3. Minimnya fasilitas pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/ Kota.
4. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penguji Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kurangnya prasarana pelayaran dan penyeberangan serta rambu sungai.
6. Banyaknya masyarakat yang beralih moda dari transportasi sungai ke jalan karena perkembangan jalan.
7. Fasilitas keselamatan pelayaran (rambu suar, menara suar dll) yang masih minim.
8. Kurangnya SDM teknis operasional di bidang pelayaran.
9. Masih belum adanya pelayanan pemadu moda dari transportasi udara ke darat maupun dari transportasi laut ke darat, begitu pula sebaliknya di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kurang efektifnya Terminal type B di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peluang dalam menghadapi tantangan yang ada, antara lain :

1. Melengkapi fasilitas keselamatan jalan, guna meningkatkan keselamatan di jalan.
2. Meningkatkan jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten/ Kota disertai dengan pemenuhan SDM terkait yang ahli dibidangnya.
3. Meningkatkan fasilitas dermaga dan rambu sungai guna meningkatkan kenyamanan pengguna jasa dan keselamatan penyeberangan.
4. Meningkatkan fasilitas keselamatan pelayaran dan SDM teknis operasional pelayaran dengan mengikuti diklat teknis.
5. Perlu adanya studi tentang pelayanan pemadu moda agar Provinsi Kalimantan Tengah semakin berkembang dan mempermudah akses bagi pengguna transportasi Darat, Laut, Udara maupun Penyeberangan.



6. Meningkatkan prasarana dan fasilitas yang terdapat di terminal type B yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga para operator angkutan umum mau masuk dan melayani penumpang di terminal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Meningkatkan fasilitas dermaga, jadi walaupun jumlah penumpang mengalami penurunan namun angkutan barang dapat meningkat untuk mengurangi beban jalan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) $\pm$ 8 Ton.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Transportasi saat ini semakin sangat penting peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Semakin mudah akses sarana dan meningkatnya pelayanan transportasi maka semakin baik pula tingkat mobilitas masyarakatnya.

Selain itu terdapat pula beberapa permasalahan transportasi secara umum di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengemudi, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.
2. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
3. Kurang tersedianya fasilitas keselamatan jalan di Provinsi Kalimantan Tengah seperti marka, rambu, RPPJ, Delineator, Guadrail, Paku Jalan dan lainnya, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian, pengrusakan dan adanya perbaikan jalan sehingga rambu tidak dipasang kembali.
4. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut.
5. Besarnya tingkat pengguna kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
6. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi priority bagi pemangku kebijakan.
7. Belum tertatanya manajemen pengusaha angkutan travel, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pribadi/ orang yang mengelola usaha angkutan travel secara pribadi, tanpa ada izin.
8. Belum tersedianya *Data Base* sungai – sungai yang menggambar secara menyeluruh berkaitan dengan alur, sarana prasarana dan fasilitas keselamatan yang akan dibangun.



9. Belum lengkapnya rambu-rambu sungai dan fasilitas dermaga, hal ini disebabkan kurangnya anggaran yang dimiliki.
10. Berkurangnya jumlah penumpang angkutan SDP, hal ini disebabkan karena pengalihan moda ke transportasi jalan.
11. Bandara di Kalimantan Tengah yang belum mampu melayani rute penerbangan dengan jenis pesawat berkapasitas besar.
12. Belum adanya pepadu moda dari moda Transportasi Udara ke Transportasi Jalan dan moda lainnya.
13. Kurangnya sumber daya manusia teknis yang memadai, hal ini disebabkan karena anggaran yang kurang memadai untuk mengirimkan aparatur untuk mengikuti diklat teknis.

Permasalahan tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu Dinas Perhubungan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang diimplementasikan dalam visi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

Dari visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu Maju, Mandiri dan Adil yang bertujuan untuk mencapai Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis), hal ini ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang Transportasi sesuai tupoksi untuk ikut menyukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”



maka salah satu tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah ikut mewujudkan sistem transportasi Provinsi Kalimantan Tengah yang aman, nyaman, efisien, murah dan selamat untuk membantu masyarakat menjadi lebih maju. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah terkait visi tersebut yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan kata lain Dinas Perhubungan memiliki fungsi dalam Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan juga penyelenggaraan pelayanan umum di bidang guna mewujudkan Provinsi Kalimantan Tengah yang nyaman di bidang transportasi dengan memberikan sumbangsi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya visi Kepala Daerah harus didukung misi yang baik, adapun Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Keterkaitan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung infrastruktur transportasi yang nyaman. Walaupun Dinas Perhubungan dalam pencapaian Visi, Misi dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD masuk didalam kategori Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, namun dinas perhubungan tetap memiliki kewajiban dalam meningkatkan pelayanan dalam kaitannya pemenuhan prasarana dan fasilitas pendukung transportasi.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan dan pelayanan umum agar terciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman. Faktor – faktor yang mungkin menjadi penghambat pelayanan Dinas Perhubungan dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya :

- 1) Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat dan belum memadainya sarana angkutan umum AKAP, AKPD sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi.
- 2) Kelas Bandara yang masih rendah dan adanya daerah yang belum memiliki Bandara Perintis.
- 3) Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/ hilangnya fasilitas kelengkapan dan fasilitas keselamatan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.
- 4) Belum tersedianya fasilitas terminal angkutan barang di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Jalan khusus dan terminal khusus untuk hasil produksi pertanian, perkebunan, pertambangan dan khusus yang masih belum terencana dengan baik, sehingga angkutan hasil produksi tersebut masih menggunakan jalan umum dengan melebihi kapasitas jalan.

Adapun faktor – faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- 1) Angkutan umum di jalan bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan, sehingga dapat menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum



dengan meningkatkan prasarana dan fasilitas pendukungnya dan meningkatkan pengawasan kepada operator angkutan tersebut.

- 2) Terdapat dana sharing APBN dari Kementerian Perhubungan untuk program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
- 3) Tersedianya dermaga sungai yang memadai.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

1. Sub Sektor Lalu Lintas Jalan

Faktor – faktor penghambat pada permasalahan pelayanan dibidang Lalu Lintas Jalan dengan telaahan Renstra K/L antara lain sebagai berikut :

- a. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan serta belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang guna meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan prasarana transportasi.
- b. Kondisi Kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi dalam upaya mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah
- c. Belum jelasnya peran dan fungsi kewenangan antar lembaga pemerintah di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- d. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di bidang LLAJ baik ditingkat regulator maupun operator dalam upaya Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi.
- e. Masih terbatasnya kemampuan daerah dalam upaya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi

Faktor – faktor pendorong pada permasalahan pelayanan dibidang Lalu Lintas Jalan dengan telaahan Renstra K/L antara lain sebagai berikut :

- a. Tersedianya fasilitas keselamatan jalan;
- b. Fasilitas perlengkapan jalan yang berperan sebagai pemandu lalu lintas pengguna jalan agar diperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sampai tujuan;
- c. Fasilitas terminal angkutan penumpang berperan sebagai pemandu antar moda transportasi;



- d. Ketersediaan sarana angkutan umum yang aman, selamat, layak, murah, efektif, efisien dan mudah dijangkau oleh pengguna angkutan umum;
- e. Sosialisasi keselamatan jalan yang berperan untuk pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas.

2. Sub Sektor Pelayaran

Faktor – faktor penghambat pada permasalahan pelayanan di Sub Sektor Pelayaran dengan telaahan Renstra K/L antara lain sebagai berikut :

- a. Terbatasnya kewenangan terkait pembinaan dan pengaturan fungsi kepelabuhanan secara maksimal (karena kewenangan ada pada UPT Dirjen Perhubungan Laut).
- b. Untuk pengembangan Pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, memerlukan dana yang cukup besar sedangkan kemampuan daerah melalui APBD terbatas.
- c. Masih kurangnya SDM khusus disiplin ilmu Bidang Transportasi Laut.
- d. Untuk alur pelayaran, mengingat tingginya tingkat sedimentasi maka diperlukan pengerukan alur pelayaran secara berkala, sehingga selalu terjaga kedalaman yang ideal untuk pelayaran kapal.
- e. Masih kurangnya fasilitas keselamatan pelayaran yang meliputi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Rambu-rambu dan Fasilitas Penunjang lainnya dalam upaya terpenuhinya jumlah kecukupan dan keandalan dari pembangunan Ramsu, Mensu dan Ramtun dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi laut.
- f. Tingkat sedimentasi Alur sungai dan anjir / terusan sangat tinggi sehingga memerlukan pemeliharaan alur dan pengerukan.
- g. Masih minimnya Fasilitas Keselamatan Pelayaran berupa rambu – rambu sungai.
- h. Sebagian besar Dermaga sungai masih Konvensional dan mengalami kerusakan
- i. Perkembangan teknologi kapal sungai tidak dapat bersaing dengan angkutan di jalan serta upaya Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.



Faktor – faktor pendorong pada permasalahan pelayanan dibidang Pelayaran dengan telaahan Renstra K/L antara lain sebagai berikut :

- a. Undang –undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.
- c. Tersedianya Sarana dan Prasarana 10 (sepuluh) pelabuhan di Kalimantan Tengah.
- d. Keberadaan sungai dan anjir / terusan masih dominan dimanfaatkan sebagai angkutan barang dan penumpang oleh masyarakat.
- e. Adanya dukungan dan untuk pembangunan dermaga, pengerukan anjir/ terusan dan Pengadaan fasilitas Keselamatan Pelayaran baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota
- f. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan yang baik.
- g. Adanya dukungan dari instansi terkait.
- h. Tersedianya alokasi anggaran.

3. Sub Sektor Angkutan Jalan

Faktor – faktor penghambat pada permasalahan pelayanan di Sub Sektor Angkutan Jalan dengan telaahan Renstra K/L antara lain sebagai berikut :

- a. Masih belum adanya pepaduan moda dari moda transportasi udara ke darat maupun dari moda transportasi laut ke darat dan sebaliknya di provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah
- b. Masih kurang efektif atau berfungsi dari Terminal Tipe B di provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Kurangnya SDM perhubungan yang memiliki kemampuan pengelola Terminal Angkutan Jalan di Kabupaten/Kota se – Kalimantan Tengah.

Faktor – faktor pendorong pada permasalahan pelayanan dibidang Angkutan Jalan dengan telaahan Renstra K/L antara lain sebagai berikut :

- a. Rencana pengembangan angkutan umum massal berbasis Bus (BRT);
- b. Rencana pembangunan Kereta Api penumpang dengan trase Palangka Raya – Banjarmasin oleh Pemerintah Pusat dan Pembangunan Kereta



Api Barang dengan Trase Puruk Cahu – Bangkuang – Bantanjung oleh konsorsium perusahaan swasta *JICA RAILWAY*.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra ini telah mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 -2021 dimana terdapat Sebagai salah satu kegiatan strategis jangka menengah nasional terdapat program pembangunan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

1. Jalur Kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;
2. Jalur Kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang-Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
3. Jalur Kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit – Kuala Pembuang – Teluk Segintung;
4. Jalur Kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan
5. Jalur Kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.

Di antara berbagai moda transportasi, kereta api telah dipilih sebagai prioritas sarana untuk transportasi terutama untuk sektor angkutan batu bara dan penumpang. Saat ini transportasi jalan dan sungai memiliki kapasitas yang terbatas, maka kereta api dianggap sebagai sarana yang lebih baik untuk transportasi angkutan batu bara dibandingkan dengan moda transportasi yang ada karena kereta api dianggap sebagai moda transportasi yang cocok untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan karakteristik, yaitu moda transportasi massal, stabil, ekonomis, cepat, aman dan ramah lingkungan .

Adapun ruang lingkup kegiatan pembangunan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Pembangunan stock pile dan fasilitas pemuatan batu bara ke kereta api dilokasi atau daerah sekitarnya.
2. Stasiun pemberangkatan kereta api dilengkapi dengan fasilitas *shunting* dilokasi dan sekitarnya.
3. Lebar gandar standard rel kereta api yang menghubungkan stasiun dengan lainnya termasuk sipil, jembatan, pensinyalan dan fasilitas lainnya.
4. Stasiun kereta api dilengkapi dengan fasilitas *shunting*.
5. Stasiun –stasiun lain, balaiyasa dan depo



6. Penggandaan dan pemeliharaan *rolling stocks*
7. Pelabuhan *barge* dan *stockpile* batu bara dan fasilitas muat untuk tongkang.
8. Pelabuhan laut terdapat *stockpile* dan fasilitas muat batu bara untuk transportasi laut.

Guna melaksanakan pembangunan pembangunan jalur kereta api harus memperhatikan rencana pengelolaan lingkungan yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana pembangunan jalur kereta api. Secara teknis pemantauan lingkungan merupakan tindakan yang bermanfaat untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.

Dalam hal pembangunan jalur kereta api harus memperhatikan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup antara lain :

1. Pencegahan dan/atau pengendalian dampak negatif (meminimalkan kerusakan lingkungan) dan berupaya mengembangkan dampak positif akibat dari kegiatan tersebut .
2. Mencegah timbulnya gangguan-gangguan operasional kegiatan pembangunan jalur kereta api yang berasal dari perubahan lingkungan atau benturan kepentingan dengan masyarakat setempat (sekitarnya).
3. Sebagai informasi dini bagi masyarakat (bekerjasama) yang dilalui kegiatan pembangunan jalur kereta api terkait dampak negatif dan positif yang ditimbulkan, sehingga dapat berpartisipasi dan bekerjasama dalam melakukan pengelolaan lingkungan.
4. Sebagai jaminan agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan dalam kegiatan pembangunan jalur kereta api.
5. Sebagai informasi untuk mengetahui secara dini perubahan kualitas lingkungan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten maupun instansi terkait serta pemrakarsa kegiatan apabila terjadi perubahan kualitas lingkungan terutama yang bersifat merugikan.

Yang perlu mendapat perhatian khusus pada tahapan pembangunan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :



1. Tahap Pra Konstruksi

a. Sosialisasi, survey tanah dan pengadaan tanah.

- 1) Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi yang benar dan tuntas terhadap masyarakat sekitap tentang rencana pembangunan jalur kereta api.
- 2) Memberikan tanggapan dan jawaban atas setiap pertanyaan dari masyarakat pada saat sosialisasi.
- 3) Membentuk panitia inventarisasi, dan melakukan inventarisasi lahan-lahan yang telah diusahakan oleh masyarakat.
- 4) Melakukan pemetaan lahan (jenis hutan yang akan dilalui dan karakteristik lahan).
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Adat, dan instansi terkait lainnya.
- 6) Melakukan musyawarah terutama dengan pemilik lahan yang terkena jalur kereta api.
- 7) Mendokumentasikan seluruh proses pengadaan lahan.

b. Perekrutan tenaga kerja pra konstruksi

- 1) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sepanjang pembangunan jalur kereta api.
- 2) Menyampaikan informasi dan komunikasi secara terbuka kepada masyarakat dengan terkait dengan proses penerimaan tenaga kerja konstruksi.
- 3) Mengutamakan tenaga kerja lokal dengan memperhatikan kualifikasi yang diperlukan.
- 4) Membatasi penerimaan tenaga kerja dari luar daerah.
- 5) Seluruh tenaga kerja diikutkan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
- 6) Proses penerimaan tenaga kerja dilakukan secara transparan meliputi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan diumumkan tenaga kerja yang diterima secara transparan.
- 7) Membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku diwilayah Kalimantan Tengah sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pendapatan para tenaga kerja.



2. Tahap Kontruksi

a. Pekerjaan pembukaan dan perkerasan tanah

- 1) Penyiraman secara berkala di area pekerjaan tanah terutama apabila tidak ada terjadi hujan.
- 2) Mengatur waktu pekerjaan tanah secara bertahap tidak sekaligus sesuai dengan rencana pekerjaan tanah.
- 3) Mencegah terjadinya kebakaran lahan disekitar pembangunan jalur kereta api.
- 4) Melakukan penanaman rumput atau vegetasi lainnya ditepi jalan untuk mengurangi proses longsor pada kawasan berbukit.
- 5) Penanaman tumbuhan penutup tanah, penanaman tumbuhan mengikuti garis kontur, penanaman gembalan rumput dan rumput akar wangi.
- 6) Melakukan pengelolaan erosi dan sedimentasi dengan cara membuat saluran drainase sementara atau parit di areal pekerjaan tanah.
- 7) Bila terdapat tebing, pemotongan tebing dilakukan setelah dilakukan test tanah.
- 8) Pemotongan dibuat landai (kemiringan maksimum 40°).
- 9) Lebar bahu jalan minimal 6 meter untuk memberi ruang keamanan seandainya ada material jatuh dari atas.
- 10) Pembuatan saluran drainase di bagian terasering dan drainase pada dinding penahan tanah.
- 11) Penebangan pohon pada area yang telah ditetapkan (pembangunan jalur kereta api).
- 12) Melakukan identifikasi flora dan fauna pada area terganggu.
- 13) Menjaga adat istiadat masyarakat setempat, cagar budaya, hutan adat, kawasan hutan lindung dan tempat-tempat yang dianggap sakral bagi masyarakat setempat.
- 14) Merealisasikan upaya-upaya pengelolaan untuk mencegah mencemaran air (keruhan air sungai)
- 15) Perawatan mesin alat berat yang digunakan secara berkala.
- 16) Penerapan pelaksanaan pendekatan keselamatan, kesehatan kerja (K3) dalam hal penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja.
- 17) Mengatur jadwal pekerjaan tanah pada dengan memprioritaskan pada musim kemarau.



- 18) Pekerjaan tanah dilakukan pada jam kerja sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar pembangunan jalur kereta api dan ketenangan di malam hari untuk istirahat.
 - 19) Menindaklanjuti setiap laporan/pengaduan dari masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui instansi terkait berkaitan dengan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan.
- b. Pekerjaan konstruksi jembatan, pembangunan stasiun kereta api, depo BBM, *power plant* dan workshop.
- 1) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Bila memungkinkan penggunaan hidrolik (buka dipancang).
 - 3) Penerapan pelaksanaan pendekatan keselamatan, kesehatan kerja (K3) dalam hal penggunaan alat pelindung diri (APD) pada saat bekerja.
 - 4) Pekerjaan dilakukan pada jam kerja sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar dan ketenangan di malam hari untuk istirahat.
3. Tahap Operasional
- 1) Kegiatan operasional jalan rel, depo, BBM dan stasiun kereta api dilengkapi dengan penyediaan *septic tank portable*.
 - 2) Bila memungkinkan gangguan terhadap fauna yaitu dengan pembuatan gorong-gorong untuk perlintasan satwa liar.
 - 3) Bila terjadi penurunan kualitas udara dapat dilakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman yang berkanopi lebar disekitar lokasi *power plant*.
 - 4) Perawatan dan penggunaan peralatan yang masih layak pakai.
 - 5) Pengecekan kesehatan bagi operator yang bekerja dan evaluasi satu tahun sekali.
 - 6) Penyiraman yang dilakukan di lokasi yang dapat menimbulkan debu secara berkala.
 - 7) Pembuatan bangunan khusus yang dilengkapi dengan cerobong asap untuk *powerplant*.
 - 8) Lokasi operasi dijauhkan dari pemukiman masyarakat.
 - 9) Kegiatan pemeliharaan secara periodik untuk menjaga kualitas bangunan dan fasilitas pendukung jalan rel.



- 10) Pemeriksaan/monitoring kondisi jalan rel setiap hari.
- 11) Mengoptimalkan seluruh pengelolaan lingkungan dalam rangka mencegah, meminimalkan dan mengendalikan dampak lingkungan selama kegiatan berlangsung.
- 12) Menindaklanjuti setiap laporan/pengaduan dari masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui instansi terkait dengan dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan.
- 13) Melakukan koordinasi dengan Camat, badan perangkat desa, dan instansi terkait guna mencegah dan meminimalkan terjadinya konflik sosial dimasyarakat.
- 14) Memberikan informasi secara transparan dan berkelanjutan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang telah dan atau akan dilakukan oleh perusahaan selama tahap operasional berlangsung.
- 15) Pengelolaan sarana sanitasi (MCK) termasuk pasokan air.
- 16) Penerapan sistem pengelolaan sampah padat berbasis 3R (*Resude, Reuse, Recycle*) dengan menyiapkan tempat sampah sesuai dengan jenis/karakteristik sampah.
- 17) Menyediakan bak-bak sampah dalam jumlah memadai sesuai volume timbunan limbah dan menutup bak sampah (tidak membiarkan bak sampah dalam kondisi terbuka)
- 18) Memelihara saluran drainase disekitar tempat operasi.
- 19) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan pola hidup bersih dan sehat.
- 20) Bila terjadi gangguan kesehatan dapat memberikan bantuan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan seperti air bersih.
- 21) Mengadakan kegiatan pengobatan gratis secara berkala kepada masyarakat disekitar yang terkena dampak.
- 22) Bekerjasama dengan dinas / instansi yang membidangi kesehatan.
- 23) Pemeriksaan karyawan/tenaga kerja secara berkala tiap 6 bulan sekali untuk mengetahui dari berbagai macam penyakit terutama penyakit menular.
- 24) Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (*community development*) yang telah disepakati pihak-pihak terkait secara kontinue dan konsisten.
- 25) Guna meningkatkan pendapatan masyarakat, perusahaan dapat melaksanakan kemitraan usaha dengan masyarakat yang ada di desa



lokasi kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan, penyediaan bahan pangan dll.

- 26) Meningkatkan kesempatan masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan tertentu serta mendorong pembelian barang dan jasa lokal, bekerja sama dengan masyarakat meningkatkan kualitas barang dan jasa lokal.
- 27) Memberikan kemudahan dan akses kepada masyarakat setempat untuk menjual tani dari ladang/kebun mereka kepada pihak perusahaan.

4. Tahap pasca operasi

- 1) Bila terjadi keresahan masyarakat dan konflik sosial perusahaan wajib menyampaikan informasi (sosialisasi) kepada tenaga kerja terkait dengan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
- 2) Melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyelesaian hak-hak tenaga kerja sebelum dilaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
- 4) Dalam hal proses pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, pasal 156 ayat 1 menyebutkan "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon, dan / atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- 5) Berkoordinasi dengan instansi terkait perihal pelaksanaan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebijakan pengelolaan pasca operasi kereta api.



Tabel III.1
Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah
Terhadap Pembangunan jalur kereta api dengan metode lanskap berkelanjutan.

VISI : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah Berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis)		
MISI II : Pengelolaan Infrastruktur		
KPR Prioritas RPJMD	Migitasi / Adaptasi	Rekomendasi
KRP 5 Jalan Kereta Api	Migitasi : Pengendalian terhadap limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Perlu kajian terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
	Adaptasi : Pengelolaan limbah serta penyimpanan sementara limbah bekerja sama dengan pihak ke tiga	Perlu penetapan lokasi penyimpanan dan pembuangan limbah serta bekerja dengan pihak ke tiga

VISI : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah Berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis)		
MISI II : Pengelolaan Infrastruktur		
KPR Prioritas RPJMD	Migitasi / Adaptasi	Rekomendasi
KRP 5 Jalan Kereta Api	Migitasi : Antisipasi terjadinya kerusakan jalan dan gangguan lalu lintas di jalan	Perlu kajian jalan atau jalur pengangkutan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta manajemen rekayasa lalu lintas
	Adaptasi : Mengembalikan kondisi perkerasan sementara selama tahap konstruksi dan perencanaan jalan yang akan di lalui alat-alat berat	Perlu mengembalikan kondisi perkerasan seperti sebelum ada kegiatan serta memasang memasang tanda-tanda peringatan (pemberitahuan) bagi pengguna jalan seperti “Maaf jalan anda terganggu ada pekerjaan jalan”

VISI : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah Berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis)		
MISI II : Pengelolaan Infrastruktur		
KPR Prioritas RPJMD	Migitasi / Adaptasi	Rekomendasi
KRP 5 Jalan Kereta Api	Migitasi : Antisipasi terjadinya penurunan kualitas air permukaan	Perlu kajian untuk meminimalkan terjadinya penurunan kualitas air permukaan (keruhan air)
	Adaptasi : Pengendalian terhadap upaya pengelolaan untuk mencegah kekeruhan air sungai.	Perlu mengembalikan kondisi air seperti sebelum ada kegiatan pada saat pembukaan lahan jalur kereta api dan jembatan



Tabel III.2
Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah
Terhadap Pembangunan jalur kereta api dengan metode ekonomi hijau

VISI : Kalimantan Tengah Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah Berkah (bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis)						
MISI II : Pengelolaan Infrastruktur						
KPR Prioritas RPJMD	Upaya-upaya Mitigasi			Upaya-upaya Adaptasi		
	Ekonomi	Sosial	Lingkungan	Ekonomi	Sosial	Lingkungan
KRP 5 Jalan Kereta Api	Sebagai jaminan agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan dalam kegiatan pembangunan jalur kereta api	Mencegah timbulnya gangguan-gangguan operasional kegiatan pembangunan jalur kereta api yang berasal dari perubahan lingkungan atau benturan kepentingan dengan masyarakat setempat (sekitarnya).	Pencegahan dan/atau pengendalian dampak negatif (meminimalkan kerusakan lingkungan)	Mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui pembangunan jalur kereta api	Sebagai informasi dini bagi masyarakat (bekerjasama) yang dilalui kegiatan pembangunan jalur kereta api	Menghindari dampak negative dari pembangunan jalur kereta api.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isi-isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- 1) Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai dengan harapan masyarakat pengguna jasa transportasi.
- 2) Fasilitas keselamatan jalan dan rambu-rambu sungai perlu adanya penambahan, perbaikan dan penggantian untuk yang umur pakainya sudah lama.
- 3) Fasilitas pendukung transportasi (terminal, dermaga) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
- 4) Peningkatan profesional aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah disertai peningkatan pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur).



- 5) Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum.
- 6) Rencana pembangunan jaringan perkeretaapian (alih fungsi lahan).
- 7) Rencana pembangunan Kereta Api penumpang dengan trase Palangka Raya – Banjarmasin oleh Pemerintah Pusat dan Pembangunan Kereta Api Barang dengan Trase Puruk Cahu – Bangkuang – Bantanjung oleh konsorsium perusahaan swasta *JICA RAILWAY*.
- 8) Rencana pembangunan terminal angkutan barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya di dekat pergudangan, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan yaitu di kumai, sampit dan kuala kapuas (pencemaran/ kualitas lingkungan hidup)
- 9) Pengembangan sarana angkutan SDP dan fasilitas prasarananya yang memadai.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Dalam rangka menyukseskan visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai visi :

Terwujudnya Sistem Transportasi Yang Handal Dalam Kerangka Pembangunan Kalimantan Tengah Menuju Kalteng Berkah (Bermartabat, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman;
2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi guna terciptanya keselamatan transportasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi
2. Terwujudnya keselamatan transportasi

Kedua tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah beserta indikatornya dapat dilihat pada matriks dibawah ini :



Tabel III.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target
1.	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi	Rata-rata prosentase jumlah penumpang yang terlayani	1,5 %
		Prosentase Bongkar Muat Barang	10 %
2.	Terwujudnya keselamatan transportasi	Rata-rata prosentase ketersediaan prasarana keselamatan	7,5 %
		Prosentase berkurangnya angka kecelakaan	2 %

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
2. Meningkatnya keselamatan transportasi

Tujuan, Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah beserta Indikatornya dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel III.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat barang	Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi EHA
			Prosentase peningkatan jumlah penumpang pada terminal Sanggu Buntok dan Terminal Natai Suka P. Bun
			Prosentase peningkatan jumlah penumpang dan Barang ASDP di Kalimantan Tengah
2	Terwujudnya keselamatan transportasi	Meningkatnya keselamatan transportasi	Prosentase fasilitas keselamatan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan
			Prosentase rambu-rambu sungai



			terpasang dibanding jumlah kebutuhan
			Prosentase penurunan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan umum (AKAP, AKDP, AJDP, AJAP)

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

1. Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program, Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yaitu dengan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian operasional terhadap angkutan umum, Penataan sistem dan jaringan rute angkutan umum, penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas jalan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap Fasilitas Keselamatan.
- Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman dengan merehabilitasi, memperbaiki sarana dan prasarana serta fasilitas yang selama ini tersedia juga pengadaan fasilitas angkutan massal dan terpadu bersubsidi sehingga memberikan kenyamanan dan kelayakan bagi para pengguna jasa transportasi.
- Terwujudnya keselamatan transportasi dengan melengkapi fasilitas keselamatan di jalan baik rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guardrail, paku jalan, delineator serta kelengkapan rambu-rambu sungai guna meningkatnya keselamatan serta banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang peraturan perhubungan dan keselamatan bertransportasi.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau



petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dalam perwujudan sasaran.

Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1) Manajemen Angkutan Umum

Kebijakan dan strategi transportasi untuk angkutan umum adalah :

- a) Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum.
- b) Menyusun tarif angkutan umum.
- c) Monitoring, Penertiban dan Pengawasan Angkutan Umum dan Angkutan Barang.

2) Manajemen Terminal

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, yaitu tempat untuk naik dan turunnya penumpang serta bongkar muat barang, pengendalian lalu lintas serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan yaitu :

- a) Peningkatan fasilitas operasional terminal tipe B.
- b) Menyusun Peraturan Daerah terkait terminal tipe B.

3) Manajemen Keselamatan

Keselamatan transportasi adalah hal utama dalam kinerja perhubungan, untuk mendukung meningkatnya keselamatan, maka langkah yang dilakukan adalah :

- a) Menambah fasilitas keselamatan jalan, sesuai dengan panjang jalan dan kebutuhannya.
- b) Menambah rambu-rambu sungai, untuk keselamatan penyeberangan.

4) Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan. Langkah – langkah yang dilakukan antara lain :

- a) Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
- b) Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain :

1. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah.
3. Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel 5.1. berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa suatu Renstra harus memuat tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu Strategi Pembangunan Daerah Rendah Emisi (SPRE), Lanskap berkelanjutan dan Ekonomi Hijau, dapat disampaikan bahwa kajian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah telah berorientasi pada KLHS RPJMD yang tertuang didalam tabel sebagai berikut :



Tabel 5.1 Tabel Saran dan Rekomendasi Integrasi KLHS Renstra PD dari
Prespektif Strategi Pembangunan Daerah Rendah Emisi (SPRE)

KRP Pada Renstra PD- Yang relevant dengan KRP Prioritas KLHS RPJMD	Kesenjangan dari prespektif SPRE	Saran dan Rekomendasi Untuk Integrasi dan sekalius menutup kesenjangan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 3. Penataan dan Menajemen Rekayasa Lalu Lintas; 4. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan; 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aspek Lingkungan perlu dipertimbangkan secara baik dalam Program dan rincian kegiatan. Penataan pembangunan ditinjau agar tidak beririsan dengan lahan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB), Gambut dalam, Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Wilayah Adat Provinsi Kalimantan Tengah	Pembangunan agar tidak beririsan dengan 4 (empat) kategori wilayah



Tabel 5.2 Tabel Saran dan Rekomendasi Integrasi KLHS Renstra PD
dari Prespektif Ekonomi Hijau

KRP Pada Renstra PD- Yang relevant dengan KRP Prioritas KLHS RPJMD	Kesenjangan dari prespektif SPRE	Saran dan Rekomendasi Untuk Integrasi dan sekalius menutup kesenjangan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 2. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 3. Penataan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 4. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan; 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aspek Sosial dan Lingkungan agar dipertimbangkan secara baik. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan harus disertai analisis dugaan potensi dampak lingkungan dan sosial serta ekonomi secara baik. Bagaimana mitigasi dan adaptasi dari pembangunan dan harus diperkirakan antisipasinya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan harus mengacu kepada Rekomendasi KLHS RPJMD. Pada setiap Program dan Kegiatan Pembangunan harus menyeimbangkan kepentingan lingkungan, Sosial dan Ekonomi

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah (terlampir).

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)					11.979.240.000		23.950.100.000		34.839.400.000		33.536.800.000		36.400.000.000		157.765.288.950		
			2.09	URUSAN PERHUBUNGAN					11.979.240.000		23.950.100.000		34.839.400.000		33.536.800.000		36.400.000.000		157.765.288.950		
			2.09 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.864.240.000		3.085.000.000		3.310.000.000		3.463.900.000		3.740.000.000		21.196.527.750	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	3.000 surat	55.400.000	750 surat	14.000.000	2.100 surat	20.000.000	2.100 surat	30.000.000	2.100 surat	40.000.000	2.100 surat	50.000.000	12.150 surat	209.400.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis Tagihan Bulanan	3 Jenis	330.000.000	4 Jenis	400.000.000	4 Jenis	415.000.000	4 Jenis	450.000.000	4 Jenis	450.000.000	4 Jenis	450.000.000	23 Jenis	2.495.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Gedung yang Memiliki Jaminan	- gedung	-	3 gedung	30.000.000	3 gedung	35.000.000	3 gedung	40.000.000	3 gedung	45.000.000	3 gedung	50.000.000	15 gedung	200.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayarkan izinnnya	11 kendaraan	325.000.000	9 kendaraan	250.000.000	9 kendaraan	250.000.000	9 kendaraan	270.000.000	9 kendaraan	270.000.000	9 kendaraan	300.000.000	56 kendaraan	1.665.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Mengelola Administrasi Keuangan	63 orang	714.600.000	40 orang	420.368.000	40 orang	425.000.000	40 orang	435.000.000	40 orang	450.000.000	40 orang	475.000.000	263 orang	2.919.968.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pegawai Non PNS	42 orang	1.281.200.000	25 orang	916.098.000	25 orang	925.000.000	25 orang	930.000.000	25 orang	935.000.000	25 orang	950.000.000	167 orang	5.937.298.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan yang Diperbaiki	2 peralatan	75.000.000	2 peralatan	25.000.000	2 peralatan	30.000.000	2 peralatan	40.000.000	2 peralatan	45.000.000	2 peralatan	50.000.000	12 peralatan	265.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK untuk Dinas	27 Jenis	100.000.000	26 Jenis	50.000.000	30 Jenis	60.000.000	30 Jenis	70.000.000	30 Jenis	70.000.000	30 Jenis	80.000.000	173 Jenis	430.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALAN GKA RAYA
			2.09 - 01.11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	7 Jenis	75.000.000	7 Jenis	25.000.000	7 Jenis	30.000.000	7 Jenis	50.000.000	7 Jenis	70.000.000	7 Jenis	100.000.000	42 Jenis	350.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALAN GKA RAYA
			2.09 - 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Lampu dan Instalasinya yang Terpasang	507 lampu	20.000.000	205 lampu	50.000.000	205 lampu	50.000.000	205 lampu	60.000.000	205 lampu	60.000.000	205 lampu	70.000.000	1.532 lampu	310.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALAN GKA RAYA
			2.09 - 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	10 peralatan	708.435.000	2 peralatan	91.300.000	2 peralatan	100.000.000	2 peralatan	115.000.000	2 peralatan	120.000.000	2 peralatan	150.000.000	20 peralatan	1.284.735.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALAN GKA RAYA
			2.09 - 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar	3 surat kabar	50.000.000	2 surat kabar	15.000.000	2 surat kabar	25.000.000	2 surat kabar	50.000.000	2 surat kabar	75.000.000	2 surat kabar	100.000.000	13 surat kabar	315.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALAN GKA RAYA
			2.09 - 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Tersedia	2.600 porsi	114.905.000	1.500 porsi	88.235.000	1.500 porsi	100.000.000	2.000 porsi	150.000.000	2.250 porsi	175.000.000	2.500 porsi	200.000.000	12.350 porsi	828.140.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALAN GKA RAYA
			2.09 - 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	80 orang	500.000.000	40 orang	249.239.000	80 orang	260.000.000	100 orang	280.000.000	110 orang	300.000.000	120 orang	320.000.000	530 orang	1.909.239.000	Dinas Perhubungan	LUAR PROVINSI
			2.09 - 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	33 orang	328.114.000	20 orang	190.000.000	50 orang	210.000.000	50 orang	225.000.000	50 orang	230.000.000	50 orang	250.000.000	253 orang	1.433.114.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 01.24	Biaya pembayaran instruktur senam	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Senam Pagi	130 orang	21.000.000	50 orang	20.000.000	50 orang	20.000.000	50 orang	20.000.000	50 orang	23.900.000	50 orang	25.000.000	380 orang	129.900.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALAN GKA RAYA
			2.09 - 01.35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Rujukan Berobat	4 OT	34.733.750	4 OT	30.000.000	5 OT	30.000.000	5 OT	35.000.000	6 OT	40.000.000	6 OT	50.000.000	30 OT	219.733.750	Dinas Perhubungan	LUAR PROVINSI

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 01.67	Pembuatan Website Dishub Prov. Kalteng	Jumlah Website yang Tersedia	- website	-	- website	-	1 website	100.000.000	- website	-	- website	-	- website	-	1 website	100.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 01.68	Pemeliharaan Website Dishub Prov. Kalteng	Jumlah Website yang Tersedia	- website	-	- website	-	- website	-	1 website	60.000.000	1 website	65.000.000	1 website	70.000.000	3 website	195.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		- website			430.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.550.000.000		1.700.000.000		7.213.800.000	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Kantor yang Terpelihara	1 gedung	250.000.000	1 gedung	100.000.000	1 gedung	300.000.000	1 gedung	400.000.000	1 gedung	450.000.000	1 gedung	500.000.000	6 gedung	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 02.31	Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir	Jumlah Kantor yang Direhabilitasi	1 gedung	203.800.000	- gedung	-	1 gedung	450.000.000	1 gedung	500.000.000	1 gedung	550.000.000	1 gedung	600.000.000	5 gedung	2.303.800.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Kantor yang Terpelihara	1 kantor	480.000.000	1 kantor	330.000.000	1 kantor	450.000.000	1 kantor	500.000.000	1 kantor	550.000.000	1 kantor	600.000.000	6 kantor	2.910.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		1 kantor			170.000.000		187.300.000		202.100.000		242.700.000		280.000.000		1.563.100.000	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny	Jumlah Pakaian Dinas bagi Pegawai Perhubungan	360 stel	311.000.000	100 stel	85.000.000	170 stel	85.000.000	170 stel	90.000.000	170 stel	120.000.000	170 stel	150.000.000	1.140 stel	841.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Bagi Pegawai Perhubungan	180 stel	170.000.000	100 stel	85.000.000	170 stel	102.300.000	170 stel	112.100.000	170 stel	122.700.000	170 stel	130.000.000	960 stel	722.100.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		180 stel			275.000.000		230.000.000		125.000.000		130.000.000		145.000.000		1.483.875.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 05.98	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah Pegawai yang dapat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 OT	50.000.000	4 OT	50.000.000	8 OT	50.000.000	8 OT	60.000.000	8 OT	60.000.000	8 OT	70.000.000	40 OT	340.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 05.101	Seleksi Penerimaan Calon Taruna Perhubungan Bidang Perkereta Apian	Jumlah Calon Taruna yang lulus seleksi	20 orang	528.875.000	- orang	-	- orang	-	- orang	-	- orang	-	- orang	-	20 orang	528.875.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 05.132	Biaya Pemantauan, Transportasi Lokal dan Pemulangan Taruna Perhubungan Bidang Perkeretaapian	Jumlah Taruna Perkeretaapian	- orang	-	27 orang	225.000.000	4 orang	120.000.000	- orang	-	- orang	-	- orang	-	31 orang	345.000.000	Dinas Perhubungan	LUAR PROVINSI
			2.09 - 05.137	Pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dishub	Jumlah Sengketa yang Diselesaikan	- %	-	- %	-	100 %	60.000.000	100 %	65.000.000	100 %	70.000.000	100 %	75.000.000	400 %	270.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		- %			110.000.000		172.800.000		192.300.000		190.200.000		200.000.000		1.025.300.000	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Tersusun	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	6 dokumen	290.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	- dokumen	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	67.300.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.000.000	5 dokumen	267.300.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 06.06	Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun (PPAS, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P)	5 dokumen	100.000.000	5 dokumen	50.000.000	5 dokumen	72.800.000	5 dokumen	75.000.000	5 dokumen	80.200.000	5 dokumen	90.000.000	30 dokumen	468.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		5 dokum en			1.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		500.000.000		500.000.000		6.225.000.000	Dinas Perhub ungan	
			2.09 - 15.39	Studi pembangunan prasarana fasilitas perhubungan dan kominfo	Jumlah Dokumen Studi Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan dan Kominfo yang tersedia	3 dokum en	775.000.000	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	3 dokum en	775.000.000	Dinas Perhubu ngan	PROVIN SI KALIMA NTAN TENGA H
			2.09 - 15.44	Penyusunan Rencana Induk Perkereta Apian Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian yang Tersedia	- dokum en	-	- dokum en	-	1 dokum en	1.000.000.000	1 dokum en	1.000.000.000	- dokum en	-	- dokum en	-	2 dokum en	2.000.000.000	Dinas Perhubu ngan	PROVIN SI KALIMA NTAN TENGA H
			2.09 - 15.47	UKL-UPL Pembangunan Jembatan Timbang Sampit-Bagenda ng	Jumlah Dokumen UKL-UPL Pembangunan Jembatan Timbang Sampit-Bagenda ng	1 dokum en	225.000.000	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	1 dokum en	225.000.000	Dinas Perhubu ngan	KABUP ATEN KOTAW ARINGI N TIMUR
			2.09 - 15.49	Studi dan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	- dokum en	-	3 dokum en	1.000.000.000	2 dokum en	500.000.000	2 dokum en	500.000.000	2 dokum en	500.000.000	2 dokum en	500.000.000	11 dokum en	3.000.000.000	Dinas Perhubu ngan	PROVIN SI KALIMA NTAN TENGA H
			2.09 - 15.50	UKL-UPL Dermaga Penyeberangan Selat Kabupaten Kapuas	Jumlah Dokumen UKL-UPL Dermaga Penyeberangan tersedia	1 dokum en	225.000.000	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	- dokum en	-	1 dokum en	225.000.000	Dinas Perhubu ngan	KABUP ATEN KAPUA S
			2.09 - 17	Program Peningkatan pelayanan angkutan		1 dokum en			4.065.000.000		6.280.000.000		6.560.000.000		7.140.000.000		7.355.000.000		36.494.800.900	Dinas Perhub ungan	
			2.09 - 17.18	Pemantauan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan	- pemant auan	-	- pemant auan	-	2 pemant auan	100.000.000	2 pemant auan	120.000.000	2 pemant auan	130.000.000	2 pemant auan	140.000.000	8 pemant auan	490.000.000	Dinas Perhubu ngan	PROVIN SI KALIMA NTAN TENGA H

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 17.19	Pengawasan jembatan timbang	Jumlah Lokasi Pengawasan	2 kab/kota	268.034.800	- kab/kota	-	- kab/kota	-	- kab/kota	-	- kab/kota	-	- kab/kota	-	2 kab/kota	268.034.800	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.21	Monitoring sarana prasarana transportasi SDP wilayah Kalimantan Tengah	Jumlah Lokasi Monitoring	- kab/kota	-	7 kab/kota	75.000.000	11 kab/kota	-	11 kab/kota	-	11 kab/kota	-	11 kab/kota	-	51 kab/kota	75.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.24	Pengawasan Angkutan Sungai	Jumlah Lokasi Pengawasan	2 kab/kota	72.856.000	- kab/kota	-	3 kab/kota	150.000.000	4 kab/kota	200.000.000	5 kab/kota	250.000.000	5 kab/kota	300.000.000	19 kab/kota	972.856.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.26	Monitoring Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pelayaran	Jumlah Lokasi Monitoring	- kab/kota	-	5 kab/kota	75.000.000	5 kab/kota	200.000.000	5 kab/kota	250.000.000	5 kab/kota	300.000.000	5 kab/kota	350.000.000	25 kab/kota	1.175.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.27	Pembinaan SAR Daerah bidang transportasi	Jumlah Orang yang Mengikuti	25 orang	115.000.000	- orang	-	25 orang	120.000.000	25 orang	140.000.000	25 orang	150.000.000	25 orang	160.000.000	125 orang	685.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.28	Monitoring Angkutan Udara se-Kalimantan Tengah	Jumlah Lokasi Monitoring	2 lokasi	39.531.500	- lokasi	-	- lokasi	-	- lokasi	-	- lokasi	-	- lokasi	-	2 lokasi	39.531.500	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.29	Penertiban dan Pengawasan Lalu Lintas Jalan	Jumlah Lokasi Penertiban	2 kab/kota	65.000.000	2 kab/kota	45.000.000	2 kab/kota	-	2 kab/kota	-	2 kab/kota	-	2 kab/kota	-	12 kab/kota	110.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.30	Monitoring Program Pembangunan Dishub	Jumlah Lokasi Monitoring	3 kab/kota	85.777.600	4 kab/kota	100.000.000	4 kab/kota	150.000.000	4 kab/kota	175.000.000	4 kab/kota	200.000.000	4 kab/kota	225.000.000	23 kab/kota	935.777.600	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 17.33	Penyusunan dan updating peta sungai di Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Updating Peta Sungai di Kalimantan Tengah yang Tersedia	- dokumen	-	- dokumen	-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	- dokumen	-	- dokumen	-	2 dokumen	400.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.34	Monitoring penyelenggaraa n terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri	Jumlah Lokasi Monitoring	5 kab/kota	90.000.000	6 kab/kota	100.000.000	- kab/kota	-	- kab/kota	-	- kab/kota	-	- kab/kota	-	11 kab/kota	190.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.36	Pemeliharaan rutin landscape bandara tjilik riwut	Jumlah Bandara yang terpelihara	1 bandara	335.000.000	- bandara	-	- bandara	-	- bandara	-	- bandara	-	- bandara	-	1 bandara	335.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 17.42	Transportasi Emberkasi Haji antara Bandara Tjilik Riwut dengan Rute Palangka Raya - Banjarmasin	Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Antara	1.450 orang	3.000.000.000	1.450 orang	3.575.000.000	1.642 orang	4.500.000.000	1.450 orang	4.500.000.000	1.642 orang	5.000.000.000	1.642 orang	5.000.000.000	9.276 orang	25.575.000.000	Dinas Perhubungan	LUAR PROVINSI
			2.09 - 17.45	Penyediaan jasa kebersihan terminal AKAP W.A Gara (swakelola)	Jumlah Tenaga Kebersihan	1 terminal	549.601.000	- terminal	-	- terminal	-	- terminal	-	- terminal	-	- terminal	-	1 terminal	549.601.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 17.50	Expose Pembangunan Bidang Perhubungan	Jumlah Pengunjung Expose	- orang	-	- orang	-	100 orang	200.000.000	100 orang	220.000.000	100 orang	240.000.000	100 orang	250.000.000	400 orang	910.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 17.54	Pemeliharaan Gedung VIP Room Lama	Jumlah Gedung Terpelihara	1 gedung	400.000.000	- gedung	-	- gedung	-	- gedung	-	- gedung	-	- gedung	-	1 gedung	400.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 17.55	Pemeliharaan Gedung viP Room Isen Mulang	Jumlah Gedung Terpelihara	1 gedung	50.000.000	1 gedung	50.000.000	1 gedung	60.000.000	1 gedung	70.000.000	1 gedung	70.000.000	1 gedung	80.000.000	6 gedung	380.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 17.57	Monitoring Angkutan Penumpang	Jumlah Lokasi Monitoring	- lokasi	-	- lokasi	-	3 lokasi	100.000.000	4 lokasi	120.000.000	5 lokasi	150.000.000	5 lokasi	150.000.000	17 lokasi	520.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 17.58	Penertiban dan Pengawasan Angkutan Jalan	Jumlah Lokasi Penertiban	- kab/kota	-	2 kab/kota	45.000.000	3 kab/kota	100.000.000	4 kab/kota	120.000.000	5 kab/kota	150.000.000	5 kab/kota	150.000.000	19 kab/kota	565.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.60	Monitoring Pembinaan pengawasan dan Penyelenggaraa n Angkatan Laut, Kepelabuhan dan Keselamatan Pelayaran	Jumlah Lokasi Monitoring	1 kab/kota	24.000.000	- kab/kota	-	- kab/kota	-	- kab/kota	-	- kab/kota	-	- kab/kota	-	1 kab/kota	24.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.62	Monitoring Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumla Lokasi Monitoring	- kab/kota	-	- kab/kota	-	3 kab/kota	100.000.000	4 kab/kota	120.000.000	5 kab/kota	150.000.000	5 kab/kota	150.000.000	17 kab/kota	520.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 17.63	Rakor Perhubungan se-Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta Rakor	- orang	-	- orang	-	50 orang	300.000.000	50 orang	325.000.000	50 orang	350.000.000	50 orang	400.000.000	200 orang	1.375.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		- orang			1.400.000.000		4.300.000.000		3.720.000.000		4.200.000.000		4.300.000.000		19.729.868.400	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 18.13	Pengadaaan dan Pemasangan Rambu Sungai di DAS Kalimantan	Jumlah Rambu Sungai yang Terpasang	38 buah	300.000.000	- buah	-	70 buah	500.000.000	70 buah	520.000.000	80 buah	700.000.000	80 buah	800.000.000	338 buah	2.820.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 18.55	Rehabilitasi Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah	Jumlah Dermaga yang Terehabilitasi	2 dermag a	450.000.000	2 dermag a	300.000.000	4 dermag a	1.000.000.000	4 dermag a	1.200.000.000	4 dermag a	1.500.000.000	4 dermag a	1.500.000.000	20 dermag a	5.950.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 18.89	Pembangunan Dermaga Lanting di Desa Bawan	Panjang Dermaga yang Dibangun	56 m2	370.000.000	- m2	-	- m2	-	- m2	-	- m2	-	- m2	-	56 m2	370.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 18.92	Pembuatan Siring Inspeksi jalan Masuk Pelabuhan Bukit Pinang	Panjang Siring yang Dibangun	70 m	300.000.000	150 m	700.000.000	- m	-	- m	-	- m	-	- m	-	220 m	1.000.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 18.96	Pembangunan Dermaga sungai di Mengkatip	Panjang dermaga terbangun	- m2	-	90 m2	400.000.000	- m2	-	- m2	-	- m2	-	- m2	-	90 m2	400.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN BARITON SELATAN
			2.09 - 18.104	Pemeliharaan Kantor UPTD, Peralatan dan Mesin	Jumlah Kantor yang Dipelihara	2 kantor	239.868.400	- kantor	-	- kantor	-	- kantor	-	- kantor	-	- kantor	-	2 kantor	239.868.400	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 18.106	Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Terminal Tipe B	Jumlah Terminal	- terminal	-	- terminal	-	2 terminal	2.000.000.000	2 terminal	2.000.000.000	2 terminal	2.000.000.000	2 terminal	2.000.000.000	8 terminal	8.000.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 18.107	Rehab Gedung Dermaga Telang Baru	Luas Gedung yang direhab	1 gedung	150.000.000	- gedung	-	- gedung	-	- gedung	-	- gedung	-	- gedung	-	1 gedung	150.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN BARITON TIMUR
			2.09 - 18.108	Rehabilitasi Pelabuhan Dermaga Pasar Lama Buntok	Luas Dermaga yang Terehabilitasi	- m2	-	- m2	-	1 m2	500.000.000	- m2	-	- m2	-	- m2	-	1 m2	500.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN BARITON SELATAN
			2.09 - 18.109	Pengadaan Ponton/Dermaga Apung HDPE	Luas Ponton/dermaga Apung di Sampit	- m2	-	- m2	-	50 m2	150.000.000	- m2	-	- m2	-	- m2	-	50 m2	150.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
			2.09 - 18.109	Pengadaan Ponton/Dermaga Apung HDPE	Luas Ponton/Dermaga Apung di Samuda	- m2	-	- m2	-	50 m2	150.000.000	- m2	-	- m2	-	- m2	-	50 m2	150.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
			2.09 - 19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		- m2			50.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		1.800.000.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 19.01	Pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu lalu lintas, guardrail, RPPJ, delienator)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpelihara	4 unit	125.000.000	- unit	-	211 unit	150.000.000	211 unit	200.000.000	211 unit	200.000.000	211 unit	225.000.000	848 unit	900.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 19.02	Pemeliharaan/perbaikan instalasi lalu lintas (traffic light, warning light, LPJU tenaga surya)	Jumlah Instalasi Lalu Lintas yang Dipelihara/Diperbaiki	13 unit	125.000.000	4 unit	50.000.000	13 unit	150.000.000	13 unit	150.000.000	13 unit	200.000.000	13 unit	225.000.000	69 unit	900.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 23	Program Penataan dan manajemen Rekayasa Lalu Lintas		13 unit			-		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		1.500.000.000	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 23.01	Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan provinsi	Jumlah Lokasi yang Direkayasa	- lokasi	-	- lokasi	-	1 lokasi	300.000.000	1 lokasi	350.000.000	1 lokasi	400.000.000	1 lokasi	450.000.000	4 lokasi	1.500.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 24	Program Pengadaan Fasilitas Operasional Kendaraan Bermotor		- lokasi			500.000.000		-		500.000.000		-		-		1.000.000.000	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 24.03	Pengadaan Mobil	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang Tersedia	- Kendaran	-	1 Kendaran	500.000.000	- Kendaran	-	1 Kendaran	500.000.000	- Kendaran	-	- Kendaran	-	2 Kendaran	1.000.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 25	Program Peningkatan Kelembagaan dan Kualitas Aparatur		- Kendaran			60.000.000		850.000.000		390.000.000		410.000.000		450.000.000		2.310.000.000	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 25.02	Pemilihan kota tertib lalu lintas tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kota yang Mengikuti Kegiatan	4 kab/kota	100.000.000	- kab/kota	-	5 kab/kota	150.000.000	6 kab/kota	150.000.000	8 kab/kota	150.000.000	14 kab/kota	150.000.000	37 kab/kota	700.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 25.03	Penyelenggaraa n pemilihan pengujian kendaraan bermotor tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Penguji yang Mengikuti Kegiatan	- orang	-	- orang	-	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	100.000.000	120 orang	400.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 25.05	Penyusunan Draf Peraturan Daerah Tentang Andalalin	Jumlah Dokumen Perda yang Tersedia	- dokumen	-	1 dokumen	60.000.000	- dokumen	-	- dokumen	-	- dokumen	-	- dokumen	-	1 dokumen	60.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 25.06	Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi kalimantan Tengah	Jumlah awak angkutan yang mengikuti kegiatan	30 orang	50.000.000	- orang	-	30 orang	50.000.000	50 orang	70.000.000	50 orang	80.000.000	50 orang	100.000.000	210 orang	350.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 25.07	Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Tingkat Provinsi Kalimantan	Jumlah Pelajar yang mengikuti kegiatan	- orang	-	- orang	-	30 orang	50.000.000	50 orang	70.000.000	50 orang	80.000.000	50 orang	100.000.000	180 orang	300.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 25.08	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Andalalin	Jumlah Dokumen Perda yang tersedia	- dokumen	-	- dokumen	-	1 dokumen	500.000.000	- dokumen	-	- dokumen	-	- dokumen	-	1 dokumen	500.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 26	Program penyelenggaraa n sosialisasi seminar, publikasi dan workshop		- dokumen			-		375.000.000		500.000.000		600.000.000		750.000.000		2.225.000.000	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 26.05	Sosialisasi Keselamatan LLAJ	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	- orang	-	- orang	-	25 orang	75.000.000	30 orang	100.000.000	40 orang	120.000.000	50 orang	150.000.000	145 orang	445.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 26.06	Sosialisasi dan Pelatihan Smart driving (Eco driving) dalam rangka Menurunkan Emisi gas Rumah Kaca	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	- orang	-	- orang	-	25 orang	75.000.000	30 orang	100.000.000	40 orang	120.000.000	50 orang	150.000.000	145 orang	445.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 26.07	Penyuluhan / Sosialisasi tentang Keselamatan Pelayaran	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	- orang	-	- orang	-	25 orang	75.000.000	30 orang	100.000.000	40 orang	120.000.000	50 orang	150.000.000	145 orang	445.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 26.08	Penyuluhan dan Pembinaan Pengemudi Angkutan Penumpang dan Barang	Jumlah Orang mengikuti kegiatan	- orang	-	- orang	-	25 orang	75.000.000	30 orang	100.000.000	40 orang	120.000.000	50 orang	150.000.000	145 orang	445.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 26.09	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Andalalin	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	- orang	-	- orang	-	25 orang	75.000.000	30 orang	100.000.000	40 orang	120.000.000	50 orang	150.000.000	145 orang	445.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27	Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan		- orang			955.000.000		5.050.000.000		15.600.000.000		14.150.000.000		15.900.000.000		53.138.016.900	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 27.09	Pengadaan dan pemasangan traffic light solar cell	Jumlah Traffic Light yang Dipasang	- unit	-	- unit	-	4 unit	700.000.000	3 unit	600.000.000	3 unit	700.000.000	4 unit	800.000.000	14 unit	2.800.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.10	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan (Pendamping Dak)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	4 paket	200.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.12	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Kumai -	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- unit (rambu)	-	35 unit (rambu)	255.000.000	- unit (rambu)	-	- unit (rambu)	-	- unit (rambu)	-	- unit (rambu)	-	35 unit (rambu)	255.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
			2.09 - 27.12	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Kumai -	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	300.000.000	- paket	-	- paket	-	1 paket	300.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 27.13	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Sampit - Samuda -Ujung Pandaran	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	1 paket	671.050.000	1 paket	350.000.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	2 paket	1.021.050.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
			2.09 - 27.14	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Ujung Pandaran - Kuala	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	1 paket	199.045.900	1 paket	350.000.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	2 paket	549.045.900	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.15	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Bukit Liti - Bawan - Kuala Kurun	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	1 paket	186.809.000	- paket	-	1 paket	700.000.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	2 paket	886.809.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.16	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	1 paket	200.000.000	- paket	-	1 paket	700.000.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	2 paket	900.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.17	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pelantaran - Parenggean - Tumbang	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	1 paket	700.000.000	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	700.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.19	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Sp. Pundu - Tumbang Samba (DAK)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	200 m' (guardrail)	176.112.000	- m' (guardrail)	-	- m' (guardrail)	-	- m' (guardrail)	-	- m' (guardrail)	-	- m' (guardrail)	-	200 m' (guardrail)	176.112.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 27.21	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Sp. Pundu - Tumbang Samba (Pendukung DAK)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	200 m' (guardrail)	50.000.000	- m' (guardrail)	-	- m' (guardrail)	-	- m' (guardrail)	-	- m' (guardrail)	-	- m' (guardrail)	-	200 m' (guardrail)	50.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.26	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Sp. Bangkal -	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.800.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.27	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Patung - Hayaping - Bentot	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	1 paket	100.000.000	- paket	-	2 paket	900.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.28	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Bentot - Pasar Panas - Batas Kalsel	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.800.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.29	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Lingkaran Luar Muara	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.800.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.30	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pulang Pisau - Pangkoh	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.800.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 27.31	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pangkoh - Bahaur	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.800.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.32	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Kuala Kapuas - Palingkau -	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.800.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.33	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.800.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.37	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Sp. Patas - Tabak Kanilan - Rikut Jawa - Buntok	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.200.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.38	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan S. Kenawan - Riam	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.200.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.39	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Riam Durian - Kotawaringin	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.200.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 27.40	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Riam Durian -	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.41	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Sei Rangit - Pel. CPO Bumi	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.42	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Lingkar Selatan Kota	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	300.000.000	2 paket	1.100.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.43	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Tumbang Sangai - Tumbang	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.44	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan A. Yani (Nanga Bulik)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
			2.09 - 27.56	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Merdeka Raya (Buntok)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN BARITO SELATAN
			2.09 - 27.57	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Tugu	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	KABUPATEN BARITO SELATAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 27.58	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Jbt. Bahitom - Kota	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	KABUP ATEN MURUNG RAYA
			2.09 - 27.59	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pahlawan (Buntok)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	1 paket	500.000.000	- paket	-	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.500.000.000	Dinas Perhubungan	KABUP ATEN BARITO SELATAN
			2.09 - 27.60	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pulang Pisau menuju ke Pelabuhan	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	1 paket	500.000.000	- paket	-	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.500.000.000	Dinas Perhubungan	KABUP ATEN PULANG PISAU
			2.09 - 27.61	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Pemuda (Kuala Kapuas)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	1 paket	500.000.000	- paket	-	1 paket	1.000.000.000	- paket	-	2 paket	1.500.000.000	Dinas Perhubungan	KABUP ATEN KAPUAS
			2.09 - 27.62	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Patih Rumbu (Kuala	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	KABUP ATEN KAPUAS
			2.09 - 27.63	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Lingkar Kota Muara	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	- paket	-	1 paket	800.000.000	- paket	-	1 paket	1.200.000.000	2 paket	2.000.000.000	Dinas Perhubungan	KABUP ATEN BARITO UTARA
			2.09 - 27.64	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan (DAK)	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- paket	-	- paket	-	1 paket	200.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	350.000.000	4 paket	1.100.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2016		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2021)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			2.09 - 27.66	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Ruas Jalan Provinsi di Kota Palangka	Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpasang	- unit (rambu)	-	- unit (rambu)	-	221 unit (rambu)	500.000.000	- unit (rambu)	-	- unit (rambu)	-	- unit (rambu)	-	221 unit (rambu)	500.000.000	Dinas Perhubungan	KOTA PALANGKA RAYA
			2.09 - 34	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		- unit (rambu)			100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		860.000.000	Dinas Perhubungan	
			2.09 - 34.01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah Aset	41 unit	160.000.000	41 unit	100.000.000	41 unit	120.000.000	41 unit	140.000.000	41 unit	160.000.000	41 unit	180.000.000	246 unit	860.000.000	Dinas Perhubungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jumlah									11.979.240.000		23.950.100.000		34.839.400.000		33.536.800.000		36.400.000.000		157.765.288.950		